

PARTISIPASI PEDAGANG DALAM PENANGANAN KEBERSIHAN PUSAT KOTA MANADO

William A. Areros

E-mail: areros.william@yahoo.co.id

Abstrak, Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan partisipasi pedagang di Pusat Kota dalam penanganan kebersihan Kota Manado. Hasil penelitian ini diupayakan untuk pengembangan konsep dan keilmuan pada kajian administrasi juga diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Manado dalam penanganan kebersihan di pusat kota sebagai pusat perekonomian Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan belum timbulnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang untuk berpartisipasi secara langsung dalam membersihkan sampah di sekitar tempat berdagang. Situasi ini terlihat dari masih dijumpainya pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan menganggap bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kota Manado. Untuk dapat memperkuat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat partisipasi pedagang di pusat Kota Manado dalam menjaga kebersihan kota disarankan perlunya peningkatan peran pemerintah melalui komunikasi dengan melakukan penguatan kelembagaan, melibatkan secara langsung masyarakat sekitar lokasi pasar melalui kegiatan bersih kota dan perlunya penambahan fasilitas penanganan sampah seperti gerobak sampah dan tempat penampungan sampah sementara.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pedagang, Kebersihan Kota.

TRADERS PARTICIPATION IN HEALTH MANAGEMENT CENTER MANADO

Abstract, This study was conducted to reveal the participation of traders in the City Centre in the handling hygiene Manado. The results of this research effort for the development of scientific concepts and the study of administration is also expected to be material to the recommendations of Manado City Government in the handling of cleanliness in the city center as the economic center of Manado. Using qualitative methods, results showed the incidence of awareness is not particularly traders to participate directly in the clean up trash around the place to trade. This situation is encountered visible from merchants who do not maintain cleanliness and hygiene is considered that the responsibility of the government of Manado. In order to strengthen and foster community participation merchant participation in the center of Manado in maintaining the cleanliness kote suggested the need to increase the role of government through communication with institutional strengthening, directly involving local communities through the market place and the need for additional clean city waste management facilities such as wheelie bins and trash temporary shelters.

Keywords: Public Participation, Traders, Health City.

PENDAHULUAN

Kondisi kota Manado yang kondusif dan aman mendorong pertumbuhan penduduk yang relatif cepat yang pada akhirnya berdampak pada jumlah produk sampah yang dihasilkan baik aktivitas perdagangan maupun rumah tangga. Menyikapi realitas dinamika kota tersebut pemerintah kota Manado berupaya menata dan membenahi kualitas lingkungan perkotaan baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana sumber daya dan pelayanan publik. Konsistensi dengan pernyataan tersebut Pemerintah kota Manado mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Adapun penetapan Perda ini adalah dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah kota Manado untuk menjadikan kota Manado sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia. Keinginan ini dikonkritkan dalam rumusan visi, pemerintahan kota Manado yakin “Manado Kota Pariwisata”. Faktor kondisi geografis, kekayaan alam, dan kondisi sosial budaya daerah ini dinilai oleh pemerintah Kota Manado merupakan “modal” yang amat mendukung tujuan dari kebijakan ini.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Manado menyadari bahwa apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kesadaran dari semua pemangku kepentingan dapat dicapai jika didukung oleh keadaan kota yang bersih pelaksanaan

kebijakan ini untuk memaksimalkan dan memahami tanggung jawabnya dalam pengolahan persampahan sebagai sebuah komitmen bersama dengan masyarakat dan pihak swasta untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat atau diterapkan. Dampak dari kurang dipahami kebijakan dimaksud terjadi demonstrasi LSM sebagai pemerhati lingkungan mengenai sampah yang berserahkan dimana – mana karena pengangkutan sampah yang tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan serta terjadi penumpukan sampah di saluran air yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air / drainase kota di banyak tempat.

Pada dasarnya masalah kebersihan adalah juga berkaitan erat dengan sikap dan perilaku manusia. Semakin tinggi tingkat kesadaran manusia akan masalah kebersihan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepeduliannya pada soal kebersihan. Kesadaran yang menghadirkan suatu kepedulian perlu untuk terus di tumbuhkan dan dikembangkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat termasuk para pedagang yang ada. Salah satu objek yang menjadi sorotan dalam penanganan kebersihan di Kota Manado yaitu di Pusat Kota atau yang dikenal dengan nama “pasar empat puluh lima”. Pusat Kota ini merupakan jantung perekonomian kota yang sampai saat ini masih diperhadapkan dengan permasalahan sampah.

Upaya menjadikan wajah pusat kota telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui kebijakan pengelolaan sampah, melalui penataan pedagang kaki lima, melakukan perbaikan di taman kesatuan bangsa serta menata jalur transportasi, menyediakan tempat – tempat sampah di area perbelanjaan dengan mensiagakan para polisi pamong praja di semua sudut pusat kota. akan tetapi masih juga dijumpai sampah yang berserahkan di Pusat Kota yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan dari para pedagang yang ada baik pemilik toko, pedagang kaki lima sampai dengan pedagang musiman mewarnai keberadaan pusat kota.

Melihat kenyataan ini maka diperlukannya suatu pemahaman bersama dari semua warga kota akan pentingnya kebersihan. Pemahaman yang baik dan benar tentang pengelolaan sampah dapat menjadi faktor pendukung dari keberhasilan mengelola sampah di pusat kota. Pemahaman ini perlu di dukung melalui perilaku yang positif dari pedagang sebagai kontribusi yang nyata untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kota. Dengan memahami akan pentingnya kebersihan kota baik dalam kaitannya dengan kesehatan, keindahan serta kepatuhannya dalam implementasi kebijakan pemerintah, kerupakan suatu keharusan bagi warga masyarakat termasuk didalamnya pedagang yang ada di pusat kota untuk juga turut membantu pemerintah Kota Manado dalam menjaga kebersihan yang antara lain melalui tumbuhnya perilaku positif dari masyarakat pedagang dalam membersihkan pasar, tidak membiayarkan sampah berserahkan di lokasi tempat berjualan dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Olehnya penelitian ini dilakukan untuk mengungkap partisipasi pedagang dalam penanganan kebersihan pusat Kota Manado dalam upaya pengembangan konsep dan keilmuan pada kajian administrasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Manado dalam penanganan kebersihan di pusat Kota Manado yang adalah merupakan sentral dan simbol perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Davis dalam Huneryager (1967) memberikan definisi partisipasi sebagai berikut : "*Participation is defined as an individual's mental and emotional involvement in a group situation that encourage him to contribute to group goal's and to share responsibility for the*". Pengertian diatas menunjukkan bahwa partisipasi memerlukan keterlibatan mental dan emosional untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok serta untuk bertanggung jawab.

Ndraha (1990) memandang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari dua aspek yaitu : Partisipasi sebagai masukan dan partisipasi sebagai keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu: fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian pembangunan. Lebih lanjut Ndraha (1990) menyatakan bahwa : Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika

: (1) partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau organisasi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan; (2) partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan; (3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat; dan (4) dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Olehnya komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat agar dapat tergerak untuk senantiasa berpartisipasi.

Cohen dan Uphoff (1977), mengidentifikasi empat jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam menikmati hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Warga masyarakat diharapkan ikut serta merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan menikmati hasil pembangunan. Pada taraf perencanaan, masyarakat diharapkan ikut bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi kerja gotong royong dan memberi sumbangan pikiran, tenaga, atau harta benda. Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan antara lain ikut mengawasi dan merawat hasil pembangunan seperti jalan desa, gedung sekolah, saluran irigasi, hasil penghijauan. Pemanfaatan hasil pembangunan antara lain dalam bentuk berobat ke Puskesmas terdekat, menyekolahkan anak, menggunakan jalan untuk kegiatan ekonomi dan sosial, atau menempati rumah sehat yang pembangunannya diatur/dibantu pemerintah.

Sementara itu Nasikun (1989 : 230) mendefinisikan partisipasi menjadi empat tingkat konseptualisasi. Pertama, partisipasi pertama-tama harus mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan kebijakan pembangunan. Kedua, berkaitan erat dengan bentuk partisipasi yang pertama, tetapi pengungkapannya terjadi dalam proses perkembangan program dimana penduduk lapisan miskin ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan pedesaan. Ketiga, lapisan penduduk miskin dilihat sebagai konstituen program-program pembangunan secara politik tidak berdaya, dan oleh karena itu membutuhkan stimulasi dan dukungan, dan akhirnya penduduk mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Keempat, menuntut keterlibatan penduduk miskin didalam pekerjaan-pekerjaan yang disediakan masyarakat.

Tjokroamidjojo (1998) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat mengandung tiga pengertian yakni : (1) keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, (2) keterlibatan dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan, dan (3) keterlibatan dalam memetik hasil serta manfaat pembangunan. Sedangkan Koentjraningrat (1981) berpendapat bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan, terutama rakyat pedesaan, terdiri atas

dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu : (1) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama; dan (2) Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk kebaikan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang di hadapi. Olehnya yang merupakan target dari kebijakan itu sendiri adalah masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam implementasi kebijakan, pemerintah memerlukan peran dan dukungan dari masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari domain good governance untuk berpartisipasi (Rasyid 1996). Partisipasi masyarakat menjadi mutlak diperlukan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah termasuk dalam menjaga kebersihan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dalam hal ini dalam menjaga kebersihan kota dapat dilihat dari kesungguhan warga masyarakat menyumbangkan waktu dan tenaga serta materi/tanah dan bahan-bahan dalam mendukung kegiatan pembangunan termasuk didalamnya menjaga kebersihan kota. Apabila masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan waktu, tenaga, materi dan bahan-bahan dalam pelaksanaan pembangunan berarti bahwa masyarakat ikut terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah para pedagang baik pemilik toko, pedagang kaki lima maupun pedagang musiman dan asongan yang berjualan di pusat kota Manado dalam menjaga kebersihan kota. Sebab pengelolaan persampahan sangat perlu mendapat perhatian, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan lain sebagainya.

Sampah menurut pengertian yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah dapat dibedakan dalam 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, atau dapat pula dibedakan kedalam jenis sampah basah (garbage), sampah kering (rubbish) atau sampah lembut/debu (ashes). Pengelolaan sampah kota selain bertujuan untuk memelihara kebersihan dan keindahan kota sehingga menjadi kota yang bersih dan indah unuk ditempati maka pengelolaan sampah kota juga ditiik betarkan pada upaya menjaga kelesarian lingkungan hidup atau ekosistem yang ada didalamnya, sehingga terasa untuk terus menjaga kelangsungan hidup ekosistem dengan berupaya menghindari pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan sampah kota lebih ditujukan pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup sehingga terjaga kelestarian ekosistem didalamnya (Amsyari, 1997).

Pengelolaan sampah yang kurang tepat juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat seperti kebersihan dan keindahan kota, mengganggu kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial (Mochtar, 1994). Sampah kota pada dasarnya adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber

dan merupakan hasil aktifitas manusia yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis. Karena sampah merupakan hasil aktifitas manusia maka orang tidak mempunyai hak untuk menolaknya.

Untuk itu, sebagaimana pemikiran (Said, 1987) baik pemerintah maupun masyarakat harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah ini dengan baik, dengan manajemen pengelolaan sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan mulai memperhatikan pengelolaan sampah ini dengan memperhatikan kelembagaan khusus yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah, dengan anggaran (biaya) yang khusus pula dan yang juga penting untuk diperhatikan adalah masalah tehnik operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk diantaranya dalam peletakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pemerintah harus membuat program kebersihan kota dan penanggulangan sampah secara berkesinambungan (Bahar, 1996).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian sehubungan dengan partisipasi pedagang di pusat kota dalam menjaga kebersihan pusat Kota Manado. Pemilihan pendekatan kualitatif adalah untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dengan menekan kepada interpretasi bukan pada generalisasi dan lebih ditekankan dalam mengungkapkan *meaning* dan memahami fenomena partisipasi pedagang dalam penanganan di kebersihan pusat Kota Manado.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah data dari semua pihak dimana diharapkan data yang akurat, lengkap dan mendalam dari para informan dalam mengungkapkan partisipasi pedagang dalam penanganan di kebersihan pusat Kota Manado. Informan yang diwawancarai sehubungan dengan penelitian ini merupakan representasi keterwakilan dari Pedangan baik pemilik toko, pedagang kaki lima dan pedagang asongan), Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan serta sejumlah Masyarakat yang ditemui di lokasi pusat kota yang sementara berbelanja. Data sekunder meliputi dokumen tertulis yang sejak awal menjadi bahan dalam penelitian empiris di lapangan menyangkut data yang berhubungan dengan dokumen – dokumen yang ada kaitannya dengan partisipasi pedagang dan pengelolaan sampah baik aturan, artikel, buku maupun karya ilmiah lainnya yang dijadikan rujukan teoritik.

Proses analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan penelitian yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian di pusat Kota Manado dalam partisipasi pedagang dalam penanganan di kebersihan pusat Kota Manado. Melakukan pengamatan secara mendalam tentang masalah penelitian dikaitkan dengan fenomena yang ada. Melakukan wawancara mendalam

dengan informan tentang partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan kota yang lebih diarahkan pada penanganan masalah sampah dikaitkan dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya kendala dan tantangan yang di hadapi. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap berikut kategorisasi dan mereduksi data, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan partisipasi pedagang dalam penanganan kebersihan di Pusat Kota Manado, melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokkan dan melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, serta melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya, Kota Manado telah mengalami dua fase perkembangan wilayah, yaitu fase sebelum perluasan wilayah memiliki luas 12.359 Ha yang terdiri dari tiga kecamatan dengan empat puluh enam Kelurahan; dan fase kedua yaitu setelah adanya perluasan menjadi 15.276 Ha yang terdiri dari lima kecamatan dengan empat puluh enam kelurahan dan dua puluh dua desa. Dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 2000 telah melakukan pemekaran wilayah yaitu dari lima kecamatan menjadi Sembilan kecamatan dan dari enam puluh delapan kelurahan menjadi delapan puluh tujuh kelurahan sampai dengan saat ini.

Kota Manado berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa secara keseluruhan berjumlah 473.066 Jiwa yang terletak di Sembilan wilayah kecamatan. Sementara itu dengan adanya keberadaannya sebagai ibu kota provinsi, kota dagang dan kota jasa di siang hari penduduk yang beraktivitas di Kota Manado kurang lebih 500.000 jiwa. Kota Manado yang beriklim tropis dengan suhu udara rata – rata 23 – 32 derajat celsius sebagai daerah yang berada di pesisir pantai. Iklim kota diwarnai dengan angin muson yang bertiup pada bulan november sampai april. Keadaan ini mengakibatkan curah hujan cukup tinggi pada bulan tersebut. Pada bulan mei sampai dengan oktober angin bertiup dari arah selatan yang membawa iklim kering sehingga keadaan ini mengakibatkan musim kemarau. Topografi Kota Manado merupakan daerah cekungan dimana terdapat 12 sungai besar yang bermuarah di teluk Manado. Aliran sungai utama adalah sungai Tondano, sungai sawangan, sungai malalayang, sungai sario/wanea dan sungai bailing.

Dari berbagai aktivitas masyarakat dalam memenuhi kehidupan, masih ada yang belum dapat sepenuhnya ditangani oleh negara seperti kegiatan ekonomi informal. Sifatnya digambarkan sebagai usaha golongan ekonomi lemah, usaha rumah tangga, usaha kecil masyarakat seperti; pedagang kakilima, pedagang asongan, tukang becak, sopir bajay, tukang ojek, pemulung dan sebagainya. Padahal dipandang dari sisi kesempatan kerja,

sektor informal merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan masyarakat, karena selain dapat memberi peluang lapangan pekerjaan, juga dapat dianggap sebagai katup pengaman merajalelanya pengangguran.

Bila diamati secara empiris, sektor informal mudah dimasuki oleh tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat karena tidak disyaratkan tingkat pendidikan, tidak dituntut keahlian khusus, beroperasi dalam skala kecil, bersifat padat tenaga kerja, teknologi seadanya, tidak mengandalkan pendanaan dari lembaga keuangan resmi dan hubungan kerja berdasarkan asas saling percaya serta kurang adanya bentuk proteksi hukum yang melindungi kepentingan pekerja oleh pemerintah.

Salah satu sub sektor informal itu adalah pedagang. Perkembangannya cepat sebagai akibat sulitnya peluang kerja disektor formal. Perkembangan dan pertumbuhannya tidak mungkin dapat ditahan sebab kehadiran pedagang ini memang dibutuhkan oleh warga kota yang berpenghasilan menengah kebawah, khususnya memenuhi tuntutan kebutuhan barang/jasa murah bagi masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal sendiri.

Pedagang dipandang dari sisi ketenagakerjaan dan sumber pendapatan masyarakat merupakan salah satu basis ekonomi masyarakat bawah yang mempunyai tatanan kuat sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai gejolak ekonomi yang telah dihadapi negara, pedagang kakilima tetap dapat eksis, baik untuk menyediakan barang/jasa murah maupun sebagai penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan penduduk dan aktivitas perekonomian yang pesat di pasar empat puluh lima sebagai pusat kota dan pusat perdagangan memberikan konsekuensi yang besar terhadap penumpukan sampah. Di Kota Manado pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Volume sampah yang tersebar setiap hari di Kota Manado diperkirakan 2.271 meter³. dengan perhitungan volume sampah untuk setiap penduduk 0.004 m³ X 473.066 Jiwa ditambah 20 % pendatang. Sementara pengangkutan sampah ke TPS hanya sekitar 85 % dari 2.271 m³ atau sekitar 1.930m³ sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah setiap hari. Dalam kondisi besaran volume sampah yang ada Pemerintah Kota Manado dengan pola penanganan “Kumpul – Pilah - Olah” menggerakkan 709 tenaga harian lepas untuk menangani sampah yang ada. Kenyataan awal yang terlihat menunjukkan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Manado diperhadapkan pada jumlah pembuangan sampah yang kurang dan sarana pengangkut sampah yang terbatas membuat masalah sampah belum dapat diselesaikan dengan baik.

Pengelolaan persampahan sangat perlu mendapat perhatian pemerintah, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah yang kurang tepat juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat seperti kebersihan dan keindahan kota, mengganggu kesehatan, pendidikan, perumahan,

jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Sampah kota pada dasarnya adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber dan merupakan hasil aktifitas manusia yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis. Karena sampah merupakan hasil aktifitas manusia maka orang tidak mempunyai hak untuk menolaknya.

Dengan melihat sampah sebagai suatu permasalahan yang menjadikan masalah krusial yang sangat memerlukan penanganan dalam pengelolaannya dimana dengan penambahan penduduk dan pola monsumsi serta adanya aktivitas perekonomian mengakibatkan bertambahnya volume sampah serta jenis sampah yang beragam semakin beragam.

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan adanya permasalahan pengelolaan sampah di Kota Manado dalam pola penanganannya menunjukkan tidak optimalnya kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah yang sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Kondisi ini diikuti dengan belum timbulnya kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi secara langsung dalam membersihkan sampah di sekitar tempat mereka berjualan. Kenyataan ini terlihat dari sampah yang diangkut dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir tidak seluruhnya terangkut sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang baik serta menimbulkan aroma yang mengganggu, waktu pembuangan sampah dari tempat pembuangan sementara tidak dipatuhi oleh masyarakat sehingga sampah selalu menumpuk setiap hari maupun kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Pengelolaan dan pelayanan kebersihan di Kota Manado ditangani langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado berdasarkan peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado. Sementara itu kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado berpijak pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Selain kebijakan tersebut diatas untuk menunjang kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Manado juga melakukan kegiatan dengan nama "JUMPA BERLIAN" (Jumat Pagi Bersih Lingkungan Anda) sebagai bentuk kegiatan bersih – bersih kota dengan menggerakkan semua komponen kota baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk terlibat langsung dalam membersihkan Kota Manado.

Dalam menjalankan kebijakan semestinya memperhatikan faktor dukungan masyarakat yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan kebijakan. Munculnya dukungan dipengaruhi oleh persepsi terhadap kebijakan dimaksud. Persepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perilaku, karena itu ada keterkaitan antara persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan dengan terbentuknya perilaku. Pembentukan perilaku disiplin diawali tumbuhnya persepsi yang mendukung kebenaran tujuan kebijakan sehingga menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan yang dipegang teguh sebagai pendiriannya dan

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Implementasi kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perilaku disiplin dapat terlebih dahulu mempengaruhi persepsi masyarakat untuk menumbuhkan dukungan yang baik yang didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan kebenaran kebijakan tersebut sehingga teraktualisasikan dalam sikap dan perilakunya.

Perkembangan perkotaan dewasa ini tidak saja ditandai dengan kemajuan industrialisasi tetapi juga perkembangan sektor informal, khususnya pedagang. *Publik policy* tersebut harus dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat. Misalnya jasa publik yang disediakan dapat dimanfaatkan warga negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan, baik disektor riil maupun disektor informal. Masyarakat pedagang dalam melaksanakan aktifitasnya berada di bawah layanan pemerintahan. Pelayanan itu menyangkut suatu hak yang melekat pada setiap warga negara dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah guna terwujudnya mekanisme perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan hak perlindungan oleh negara dalam suatu koridor ketertiban bagi kehidupan masyarakat umumnya.

Pedagang pasar yang ada di pusat kota sebagai bagian dari kelompok masyarakat kota yang dalam aktivitas kesehariannya banyak memproduksi sampah diharapkan dapat menjadi bagian dari pemerinah untuk membantu membersihkan sampah hasil produksi usaha minimal dapat mengumpulkan dan membuang di tempat penampungan semenara yang berada di sekitar pasar. Suatu permasalahan yang dihadapi oleh pedagang di pusat kota dimana penanganan sampah pasar masih ditangani oleh Dinas Pasar. Akan tetapi kenyataan yang terjadi pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan pola penanganan yang ada. Dalam kondisi pasar yang berada di pusat kota dan berdekatan dengan pelabuhan Manado juga dikelilingi oleh rumah penduduk dan perkantoran menjadikan salah satu kendala penanganan sampah di pasar.

Kurangnya perhatian dari pemerinah secara langsung dengan cara menyediakan gerobak sampah, menetapkan lokasi penampungan sementara serta kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, Dinas Pasar dan Pemerintah Kecamatan menjadikan pola penanganan kurang teratur. Akan tetapi adanya pemahaman akan pedagang di pusat kota dan masyarakat sekitar akan pentingnya kebersihan menjadi suatu nilai positif dalam menumbuhkan patrisipasi para pedagang dalam menjaga kebersihan kota.

Upaya Pemerinah Kota Manado melalui pedoman kerja Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Manado yang menetapkan Visi "Menciptakan manajemen persampahan berbasis masyarakat guna terwujudnya masyarakat Kota Manado yang aman, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat" dan Misi : "Mewujudkan Kota Manado Bersih, Hijau, Indah dan Berseri serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota

Manado". Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Manado menetapkan strategi dasar yang melandasi setiap langkah dan tindakan yang diambil yang antara lain yaitu pemberdayaan masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan sampah dan keindahan kota.

Dengan demikian pengelolaan sampah kota selain bertujuan untuk memelihara kebersihan dan keindahan kota sehingga menjadi kota yang bersih dan indah unuk ditempati maka pengelolaan sampah kota juga ditiik betarkan pada upaya menjaga kelesarian lingkungan hidup atau ekosistem yang ada didalamnya, sehingga terasa untuk terus menjaga kelangsungan hidup ekosistem dengan berupaya menghindari pencemaran lingkungan hidup (Hadiwiyoto, 1983). Pencemaran lingkungan hidup yang dapat disebabkan oleh pengelolaan persampahan yang tidak tepat terutama pembuangan sampah pada lokasi-lokasi yang dapat mengganggu kelesarian lingkungan hidup seperti disungai, selokan, taman kota dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan sampah kota lebih ditujukan pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup sehingga terjaga kelestarian ekosistem didalamnya.

SIMPULAN

Partisipasi pedagang dalam penanganan kebersihan di Pusat Kota Manado belum menunjukkan hasil yang baik yang terlihat dari masih di jumpainya pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan menganggap bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kota Manado. Untuk dapat memperkuat dan menumbuhkan partisipasi pedagang dalam penanganan kebersihan di Pusat Kota Manado disarankan :

1. Perlunya komunikasi langsung dari Dinas Kebersihan dengan pedagang yang ada di Pusat Kota.
2. Perlunya Koordinasi kerja dari Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Pusat Kota.
3. Perlunya program kerja yang jelas dan terencana dari pemerintah dengan melakukan pertemuan rutin dengan perwakilan pedagang.
4. Melibatkan secara langsung masyarakat dan pedagang di sekitar pusat kota melalui kegiatan bersih – bersih kota .
5. Melakukan penambahan fasilitas penanganan sampah seperti gerobak sampah dan tempat penampungan sampah sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad 1997, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Ghalia.
- Bahar, Yul H, 1996, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta : Wacana tama Pramesti.
- Cochran, Charles L and Eloise F. Malone.1999. *Public Policy, Perspectives and Choices, Second Edition*. Boston: McGraw-Hill College.
- Cohen, JM. Dan N.T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. Ithaca, New York: Cornell University, RDCCIS.
- Hadiwiyoto, Soewedo, 1983 *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta : Yayasan Indayu.
- Huneryager. 1967. *Human Relations in Management*. South Western Publishing Co: Edward Arnold.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mochtar, M 1994, *Kesehatan Masyarakat (Public Health)*, Jakarta : Yayasan Karya Bhakti IIP.
- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka.
- Rasyid M. Ryaas 1996 *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Said E. Gumbira 1987, *Sampah masalah kita bersama*, Jakarta : PT. Melton Putra.
- Tjokroamidjojo 1998. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo.
- Peraturan Daerah**
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.